

## **PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI TENTARA ANAK DI UKRAINA**

**Karenda Eka Karmila<sup>1</sup>**  
**Nim. 1102045183**

### ***Abstract***

*The issue of child soldiers in Ukraine emerged since the onset of the political crisis on 2014 that resulted in a conflict between the opposition and the Ukrainian government, so that UNICEF must take action to prevent and stop the child soldiers. The purpose of this study is to describe the role of UNICEF to suffering of the Child Army in Ukraine. This study used descriptive research method and secondary data. Child Soldier and Humanitarian Action concept as conceptual framework are used to answer the reseach question. The results showed that UNICEF has played an active role in addressing the issue. UNICEF has conducted monitoring to prove the truth of that issue. UNICEF has also advocated for children in Ukraine. UNICEF has provided psychosocial support more than 46,000 children and trained approximately 5,000 teachers and psychologists.*

**Keywords:** *Child Army, UNICEF, Ukraine.*

### **Pendahuluan**

Tentara anak bukanlah suatu isu yang baru di dunia internasional. Permasalahan ini banyak ditemukan hampir di setiap konflik yang melibatkan anak-anak sebagai tentara seperti di Republik Afrika Tengah, Irak, Sudan Selatan, Suriah, Palestina dan juga termasuk Ukraina ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)).

Konflik yang melibatkan tentara anak di Ukraina berawal ketika terjadi krisis politik di dalam negara tersebut. Krisis politik di Ukraina bermula pada tanggal 21 November 2013, ketika Pemerintah Ukraina yakni Presiden Viktor Yanukovich menunda pembicaraan tentang Perjanjian dengan Uni Eropa, demi membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Langkah itu memicu kemarahan kelompok oposisi (para pendukung Tymoshenko) yang pro-Eropa, yang kemudian melakukan demonstrasi ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)). Sejak saat itu bentrok antara oposisi dan pasukan pemerintah terus berlanjut dan menyebabkan 25 orang tewas pada bulan Februari 2018. Dari kejadian itu mengakibatkan presiden Ukraina yaitu Yanukovich berhasil diturunkan secara paksa.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [carenkarmila@gmail.com](mailto:carenkarmila@gmail.com)

Rezim baru pemerintah Ukraina Presiden Turchynov yang bukan berasal dari partai manapun menjabat sebagai pelaksana tugas yang pada 25 Februari 2014 kemudian melarang penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua di suatu daerah jika digunakan sekurang-kurangnya oleh 10 persen dari jumlah penduduk daerah tersebut dan juga dilakukan penghancuran patung para tokoh-tokoh Rusia atau Soviet di Ukraina ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)). Di Ukraina sendiri terdapat dua etnis yaitu sekitar 80% etnis Ukraina & 20% etnis Rusia. Penduduk keturunan Rusia menempati wilayah di daerah Timur Ukraina seperti di Crimea, Donetsk & Luhansk.

Pendukung mantan presiden Yanukovich yang pro terhadap Rusia kemudian melakukan hal yang sama yaitu menentang rezim pemerintahan Ukraina yang baru. Di wilayah perbatasan Ukraina – Rusia muncul gerakan separatis yang diusung oleh etnis Rusia yang berusaha untuk melawan pemerintah Ukraina yang baru. Sejak saat itu konflik terus terjadi antara pasukan pemerintah dan para pemberontak.

Dari konflik tersebut muncul isu tentang adanya perekrutan pasukan bersenjata yang masih dibawah umur. Pada Januari 2015 para pemberontak di Ukraina dilaporkan merekrut anak-anak remaja untuk berangkat ke garis depan pertempuran dengan tentara pemerintah Ukraina. Hal itu disampaikan oleh militer Ukraina melalui juru bicaranya Kolonel Andriy Lysenko dari Republik Rakyat Donetsk, yang berada di wilayah kekuasaan pemberontak di Donetsk, Ukraina Timur, yaitu melakukan perekrutan relawan. Yang dimaksud Lysenko dengan relawan adalah remaja berusia 16 hingga 18 tahun yang bermukim di kawasan Donetsk dan Luhansk. Lysenko mengatakan, merekrut anak-anak berusia belia untuk terjun ke medan tempur merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kemanusiaan internasional dan Pasal 38 dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Hak-hak Anak secara khusus ([www.suara.com](http://www.suara.com)).

Sebagai salah satu bukti perekrutan tentara anak di Ukraina adalah seorang anak yang bernama Denis yang merupakan anak-anak yang baru berusia 14 tahun. Dia adalah seorang tentara anak yang ingin bergabung dengan pasukan militan pro Rusia yang memerangi pasukan Ukraina ([www.businessinsider.com](http://www.businessinsider.com)). Para pemimpin di Kiev yang didukung pihak Barat menuduh pemberontak melatih tentara-tentara anak kecil di sekolah-sekolah yang berada di bawah kendali mereka.

Selain dari pihak pemberontak, tentara Ukraina juga terlibat dalam perekrutan tentara anak. Hal tersebut dapat dilihat pada pertengahan tahun 2014 anak-anak Ukraina yang berusia antara 11-15 tahun yang sedang liburan musim panas, diberikan pembelajaran khusus dalam pengetahuan keterampilan dasar militer di kamp-kamp dekat Kiev. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari yang diadakan oleh Garda Nasional Ukraina. Anak-anak belajar untuk penggunaan senjata, selain itu mereka belajar untuk berkelahi dengan tangan kosong dan juga pemeliharaan senjata.

Perekrutan tentara anak oleh pihak pemerintah Ukraina dilakukan oleh Batalion Azov sejak tahun 2014 hingga 2017. Batalion Azov adalah resimen Garda Nasional Ukraina telah diserap ke dalam militer Ukraina sebagai sayap resmi tentara Ukraina yang memberikan akses persenjataan dari pemerintah Ukraina termasuk senapan mesin, granat, senapan sniper, dan peralatan militer terkini dan profesional lainnya

(www.medium.com). Hingga pada Agustus 2017 telah diketahui lebih dari 850 anak-anak Ukraina menerima pelatihan militer di tujuh kamp Azov di seluruh negara Ukraina.

Di negara Ukraina sendiri sejak tahun 1999 sebenarnya telah diterbitkan perundang-undangan mengenai praktik perekrutan tentara nasional. Berdasarkan Undang-Undang tentang Tugas dan Layanan Militer Ukraina tahun 1999 tersebut mengatur usia minimum untuk wajib militer adalah pada usia 18 tahun dan usia minimum pada saat mendaftar adalah pada usia 17 tahun dan usia 18 tahun untuk berpartisipasi dalam peperangan. Pada bulan September 2001 pemerintah Ukraina mengeluarkan Keputusan Presiden No.1053 yaitu menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela menjadi 18 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita (www.refworld.org). Namun dari konflik tersebut yang mengakibatkan terjadinya perekrutan tentara anak telah melanggar Keputusan Presiden tersebut.

UNICEF telah menerima bukti bahwa anak-anak dan remaja telah direkrut dan mungkin terlibat langsung dalam pertempuran di Donetsk dan Luhansk. Sampai dengan laporan itu diterima pihak UNICEF, belum ada pihak yang memberikan konfirmasi atau penyangkalan yang jelas berdasarkan bukti. Giovanna Barberis, Perwakilan UNICEF di Ukraina, mengatakan bahwa merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun merupakan suatu pelanggaran karena tentara anak dilarang menurut hukum humaniter internasional dan didefinisikan sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Pidana Internasional (www.kyivpost.com).

UNICEF adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1946 dengan nama *United Nations International Children's Emergency Fund* atau Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anak. Lembaga ini adalah salah satu anggota dari *United Nations Development Group*, dan bermarkas besar di Kota New York.

UNICEF sendiri telah hadir di Ukraina sejak tahun 1997 dengan mendirikan kantor perwakilan di Kiev, sehingga ketika terjadi perekrutan tentara anak di Ukraina pada tahun 2014 dengan segera pihak UNICEF melakukan tindakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai peran UNICEF dalam menangani tentara anak di Ukraina.

## **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

### ***Konsep Tentara Anak***

Anak menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan yang di capai lebih cepat. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 menyatakan bahwa: "Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun". Pengertian Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak

tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Konvensi termasuk juga salah satu istilah yang sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut suatu nama perjanjian Internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh Negara-negara maupun lembaga-lembaga atau organisasi internasional. Konvensi mencakup lingkungan Internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam lingkup regional maupun umum (I Wayan Partiana.2002:28).

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. *Universal Declaration of Human Rights* (Hak Asasi Manusia) merupakan dasar untuk semua standar hukum internasional hak-hak anak. Selanjutnya disusul oleh Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) tahun 1958 yang merupakan instrument internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan social anak. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau biasa di sebut *Convention on the Rights of the Child* (CRC) terdapat 54 artikel di dalamnya dan dua Protokol Opsional, yang secara umum tergambar adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
3. Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya;
4. Hak untuk terhindar dari pelecehan;
5. Hak untuk terhindar dari eksploitasi;
6. Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga;
7. Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Dalam suatu konflik, kelompok anak-anak dan perempuan sebagai warga sipil yang seharusnya dilindungi justru sering menjadi korban. Konflik dapat mendorong anak-anak menjadi pengungsi, buruh, maupun tentara. Situasi konflik menyebabkan hak anak menjadi terancam atau terlanggar baik yang berkaitan dengan hak hidup, hak berada dalam keluarga dan masyarakat, hak kesehatan, hak perkembangan, hak perkembangan kepribadian, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Tentara anak (*child soldiers*) merupakan salah satu contoh fenomena dampak konflik bersenjata. Fenomena ini hampir dijumpai di seluruh Negara di dunia. UNICEF mendefinisikan tentara anak seperti layaknya seorang anak - anak laki-laki atau perempuan - di bawah 18 tahun yang merupakan bagian dari setiap jenis kekuatan bersenjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam setiap kapasitas, termasuk, namun tidak terbatas pada: koki, kuli, utusan, dan siapa menyertai kelompok tersebut selain anggota keluarga. Ini termasuk anak perempuan dan anak laki-laki direkrut untuk tujuan seksual paksa dan atau kawin paksa. Definisi, oleh karena itu, tidak hanya merujuk pada anak yang membawa, atau telah menjalankan, senjata. Namun, bagaimanapun juga, *child soldier* tetaplah bukan suatu hal yang manusiawi, meskipun diklaim bahwa sebagian tentara anak bergabung secara sukarela, namun kondisi lingkungan yang kurang memadai membuat mereka menjadi terpaksa untuk bergabung (tidak semen-mena secara sukarela). Dan kondisilah yang kurang memadai adalah hasil eksploitasi dari pihak yang berkepentingan tertentu.

Definisi lainnya tentang tentara anak adalah keterlibatan anak yang bergantung dalam konflik bersenjata dan mereka tidak benar-benar memahami apa yang mereka lakukan, yang mereka tidak dapat memberikan persetujuan, dan yang buruk mempengaruhi hak anak untuk pertumbuhan tanpa hambatan dan identitas sebagai seorang anak. Definisi ini meletakkan dasar terhadap penggunaan tentara anak dari sudut pandang perilaku kesehatan, fisik, dan mental. Hal ini diperlukan untuk melihat solusi untuk pemulihan dan dampak dari keprajuritan anak pada masing-masing aspek pertumbuhan dan perkembangan.

### ***Konsep Humanitarian Action***

*Humanitarian Action* atau Aksi Kemanusiaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam situasi dimana aspek kemanusiaan terancam, seperti bencana alam dan bencana yang diakibatkan oleh manusia sendiri (perang atau konflik) dan memiliki tujuan untuk menyelamatkan hidup, mengurangi penderitaan dan menjaga harkat kehidupan manusia. Aksi ini juga memfasilitasi persiapan pihak-pihak apabila terjadi bencana atau krisis kemanusiaan untuk kedua kalinya. Aksi kemanusiaan memiliki empat prinsip dasar, yaitu Kemanusiaan (bahwa aksi ini dilakukan murni untuk menolong dan melindungi orang dari penderitaan), Imparsial (bahwa aksi ini dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar apapun), Netralitas (tidak berpihak) dan Kemandirian (bahwa terpisah dari otonomi dan kepentingan militer, ekonomi dan politik). Aksi ini meliputi perlindungan terhadap pihak sipil dan prajurit yang tidak lagi terlibat karena terluka, penyediaan makanan, air sanitasi, tempat bernaung, pelayanan kesehatan dan bimbingan lain yang dibutuhkan oleh para korban dan untuk mengembalikan fungsi kehidupan normal mereka. Dengan demikian keberadaan aksi ini sangatlah vital bagi keberlangsungan hidup para korban.

Bantuan yang mereka salurkan disebut dengan *Humanitarian Aids* atau bantuan kemanusiaan, dan biasanya disalurkan oleh pemerintah suatu Negara, individu, NGO, organisasi multilateral, organisasi domestik dan perusahaan privat. Sementara itu, *humanitarian workers* atau juga sering disebut dengan *aid worker* atau *humanitarian aid worker* adalah anggota dari agensi kemanusiaan PBB, badan kemanusiaan Palang dan Bulan Sabit Merah serta NGO yang memiliki tujuan kemanusiaan. Pekerja ini meliputi staff atau pekerja nasional dari organisasi internasional dan pekerja dari organisasi lokal atau nasional. Tipe pekerjaan pekerja kemanusiaan ini juga sangatlah beragam, yaitu *Middle Manager* (pemimpin tim, manajer proyek), pekerja non professional (para pekerja kantor, sopir, dan lain sebagainya) dan sukarelawan yang akan bertugas mengeksekusi pendistribusian bantuan.

Agar UNICEF dapat bekerja dengan baik dalam misi kemanusiaannya, keberadaan mereka harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu *protection* terhadap pekerja kemanusiaan adalah sebuah aspek yang tidak dapat dikesampingkan. Ketika situasi dimana mereka beroperasi tergolong dalam *non-armed conflict*, maka yang digunakan sebagai basis perlindungan mereka adalah *International Human Rights Law* dan legislasi domestik. Sementara untuk situasi konflik bersenjata, maka dasar proteksi berasal dari Hukum Humaniter Internasional atau Hukum Humaniter Internasional. Poin utama dari HHI menyatakan bahwa dalam konteks kekerasan sedang berlangsung, pembedaan penyerangan wajib untuk dibuat antara penduduk sipil dan pihak bersenjata. Pekerja kemanusiaan masuk dalam kategori warga sipil

dan mereka memperoleh hak istimewa untuk ada dalam situasi berkonflik baik internasional maupun non internasional untuk menawarkan bantuan seperti yang telah diatur dalam Protokol Tambahan I Pasal 69, 70, 71 serta Protokol Tambahan II Pasal 18. Sehingga aktor yang berkonflik harus sebisa mungkin mengurangi resiko konflik terhadap keamanan mereka dan bagi yang melanggar akan mendapatkan status sebagai penjahat perang atas kejahatan perang atau *War Crime*.

Namun, bukan hanya aktor berkonflik saja yang harus memberikan perlindungan pada pekerja kemanusiaan, pekerja kemanusiaan sendiri harus mematuhi beragam prinsip penting seperti netralitas, imparialitas dan independen. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan langsung dengan hubungan aktor dalam konflik dan pekerja kemanusiaan, dalam mempermudah negosiasi penerimaan dan penghormatan keberadaan organisasi humaniter, termasuk UNICEF. Ketika organisasi humaniter tidak lagi menepati prinsip tersebut, maka beragam ancaman akan muncul mengganggu aksi kemanusiaan mereka.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian, menggunakan metode kualitatif.

### **Hasil Penelitian**

Konflik yang terjadi di Ukraina sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 menurut perkiraan PBB mengakibatkan jumlah korban perang sekitar 9.800 jiwa ([www.id.rbth.com](http://www.id.rbth.com)). Angka ini termasuk para tentara dan warga sipil. Konflik tersebut tidak hanya mengakibatkan terjadinya korban jiwa, namun konflik ini juga mengakibatkan adanya berbagai macam permasalahan termasuk salah satunya adalah perekrutan tentara anak. Tentara anak-anak nampaknya memainkan peran di kedua sisi konflik di Ukraina. Baik pihak pemberontak maupun pihak pemerintah telah melakukan perekrutan ataupun pelatihan terhadap anak-anak untuk melakukan peperangan.

Pada awalnya isu perekrutan tentara anak dianggap sebagai informasi yang tidak akurat. Organisasi internasional dan pengamat juga melaporkan bahwa mereka tidak memiliki bukti tentang anak-anak yang bertempur di timur Ukraina. Jika ada kasus semacam itu, jumlahnya sedikit. Tetapi semakin lama konflik berlanjut dan situasi ekonomi memburuk, risiko keterlibatan anak-anak semakin meningkat. Pelanggaran yang paling umum dari hak-hak anak di timur Ukraina termasuk mengajar anak-anak bagaimana menggunakan senjata, melibatkan anak-anak dalam angkatan / kelompok bersenjata, yang mempengaruhi serangkaian hak lainnya (hak atas pendidikan, hak untuk hidup, hak standar hidup yang cukup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, dll.).

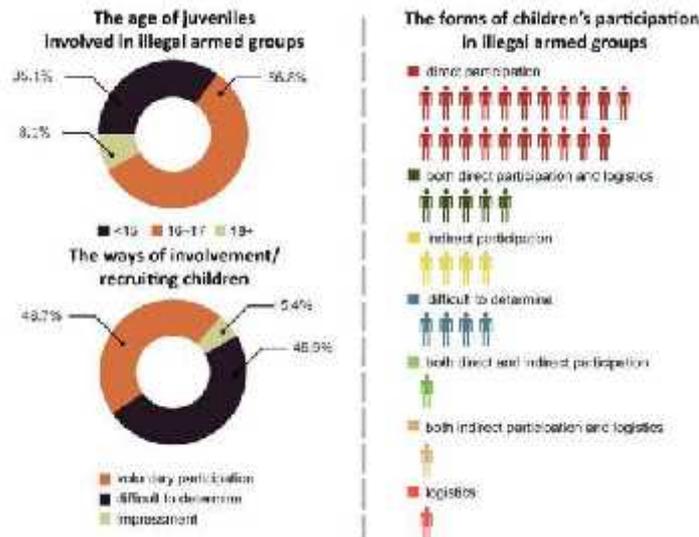
Dalam pemberitaan di internet, dari waktu ke waktu ada informasi tentang keterlibatan anak-anak dalam pasukan bersenjata. Namun, belum ada pemantauan atau pengumpulan data tentang berapa jumlah dan usia anak-anak dalam pasukan bersenjata. Saat itu, hanya ada laporan individu tentang keterlibatan orang-orang di bawah usia 18 tahun baik pada pasukan bersenjata non-pemerintah di wilayah Donetsk dan wilayah Luhansk yang tidak dikendalikan oleh Ukraina dan dalam pasukan bersenjata di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Ukraina.

Informasi di media menunjukkan peningkatan jumlah kamp militer pada kedua belah pihak yang sedang berkonflik, tetapi fenomena ini paling jelas terlihat di wilayah Donetsk dan wilayah Luhansk yang tidak dikontrol oleh Ukraina, di mana hal tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh pihak pemerintah Ukraina. Kamp-kamp itu sendiri sebenarnya tidak dilarang oleh aturan internasional, mereka ada di Ukraina sebelum konflik dimulai, namun, beberapa laporan menunjukkan bahwa anak-anak diajarkan di sana tidak hanya cara menggunakan senjata, tetapi juga taktik pertempuran, kamuflase, serta penanaman dan pemindahan ranjau.

Di wilayah Donetsk dan wilayah Luhansk yang merupakan wilayah yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Ukraina, anak-anak masih direkrut dan terus berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pasukan bersenjata. Sementara di wilayah yang dikendalikan oleh pemerintah, anak-anak berpartisipasi dalam angkatan bersenjata sukarela sejak awal terjadinya konflik bersenjata. Dalam pidatonya kepada para siswa sekolah menengah militer Ivan Bohun pada bulan Januari 2016, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengumumkan bahwa 21 remaja berusia di bawah 18 tahun telah tewas selama konflik bersenjata di bagian timur Ukraina. Saat ini perekrutan anak-anak secara sistematis ke dalam pasukan bersenjata pada kedua belah pihak dilakukan di kamp-kamp pelatihan militer yang secara resmi memiliki sifat persiapan militer dan patriotik.

Dalam satu periode selama 3 bulan, berdasarkan sumber-sumber wawancara terbuka, kelompok pemantauan melaporkan 41 kasus perekrutan anak-anak ke dalam pasukan bersenjata di mana dimungkinkan untuk mengidentifikasi orang-orang yang direkrut dan menentukan usia mereka, bentuk-bentuk dari rekrutmen, fungsi yang diadakan dalam pasukan, serta mengidentifikasi orang-orang yang melakukan perekrutan. Diluar daripada itu, ada 37 kasus yang menyangkut partisipasi anak-anak dalam pasukan bersenjata di wilayah yang tidak dikendalikan oleh Ukraina dan 4 di wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina. Selain itu, 31 kasus terdaftar di mana jumlah data tidak cukup untuk mengidentifikasi anak, tetapi ada semua alasan untuk membatasi perekrutan anak-anak ke dalam pasukan bersenjata telah terjadi.

**Gambar 3.1. Perekrutan/Partisipasi Tentara Anak Secara Ilegal**



Sumber: *Justice For Peace in Donbas Coalition*

Secara keseluruhan, situasi yang digambarkan di atas menunjukkan tren dan skala permasalahan, dan tentu saja memerlukan penyelidikan secara menyeluruh. Berdasarkan usia remaja yang terlibat dalam kelompok-kelompok bersenjata ilegal terdapat 56,8% anak-anak yang berusia 16-17 tahun, 35,1% dibawah 15 tahun dan 8,1% yang berusia 18 tahun keatas. Berdasarkan cara-cara keterlibatan / merekrut anak-anak yaitu 48,7% merupakan partisipasi sukarela, 45,9% tidak diketahui alasannya dan 5,4% perekrutan secara paksa. Sementara bentuk-bentuk partisipasi anak-anak dalam kelompok-kelompok bersenjata ilegal yaitu dengan cara partisipasi langsung, penyuplay logistic serta partisipasi tidak langsung.

Keterlibatan anak-anak dalam konflik yang terjadi di negara Ukraina sejak tahun 2014, dimana pihak pemberontak/oposisi maupun pihak pemerintah Ukraina sendiri telah merekrut anak-anak dibawah umur untuk menjadi pasukan militer telah menjadi perhatian dunia internasional termasuk *UNICEF*. Menurut *UNICEF* sendiri yang dimaksud anak-anak adalah setiap manusia yang masih berumur dibawah 18 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa tentara anak merupakan manusia berumur dibawah 18 tahun yang tergabung dalam pasukan militer atau terlibat dalam pertempuran/peperangan. Oleh sebab itu, *UNICEF* sebagai organisasi internasional yang berperan dalam hal perlindungan anak-anak, tentunya memiliki peranan dalam aksi kemanusiaan (*humanitarian action*) yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup, mengurangi penderitaan dan menjaga harkat kehidupan manusia.

Sementara itu, keberadaan *UNICEF* di Ukraina dimulai sejak pihaknya membuka kantor di Kyiv pada tahun 1997. Sejak saat itu, *UNICEF* telah bekerja untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan keluarga di seluruh Ukraina. Selama bertahun-tahun, *UNICEF* telah meningkatkan dukungannya kepada Pemerintah Ukraina untuk mengembangkan program kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan

perlindungan bagi anak-anak. UNICEF mengadvokasi hak anak untuk berpartisipasi dan memprioritaskan tindakan untuk yang paling rentan dan dirugikan ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)). Oleh karena itu ketika terjadi perekrutan tentara anak di Ukraina, pihak UNICEF dengan segera memainkan peranannya.

Ada beberapa peranan yang telah dilakukan oleh UNICEF di Ukraina untuk menangani kasus perekrutan tentara anak sejak terjadinya krisis politik pada tahun 2014, diantaranya:

***Pemantauan Perekrutan Tentara Anak***

Pemantauan merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk mencegah perekrutan anak-anak dalam pasukan bersenjata dan untuk mendokumentasikan kejahatan perang yang relevan sehubungan dengan konflik bersenjata di timur Ukraina. Hal ini penting terutama dalam kondisi ketika negara kurang memperhatikan pada masalah partisipasi anak-anak dalam pasukan bersenjata. Peningkatan laporan dalam keterlibatan anak-anak dalam formasi bersenjata ilegal membuat UNICEF memperhatikan masalah dan memulai pemantauan tematik.

Sejak akhir tahun 2014 ketika terjadi konflik di Ukraina, UNICEF telah memantau dan menyelidiki bukti bahwa anak-anak telah direkrut dan mungkin saja terlibat langsung dalam pertempuran. Pemantauan dikoordinasikan oleh Pusat Timur-Ukraina untuk Inisiatif Masyarakat Sipil. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah perekrutan anak-anak dalam pasukan bersenjata sehubungan dengan konflik bersenjata di timur Ukraina dan untuk mendokumentasikan kejahatan perang yang terkait dengan perekrutan tersebut, membawa mereka ke pengadilan yang telah bersalah merekrut anak-anak, serta membentuk kebijakan pemerintah yang akan mencegah fenomena seperti itu.

Sejak terjadinya krisis politik di Ukraina pada tahun 2014, UNICEF Ukraina telah meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pelaporan fungsi sistem pemerintahan, khususnya di ranah keadilan untuk anak-anak dan respon krisis. Melalui peran kepemimpinannya dalam Grup Pekerjaan Perlindungan Anak, UNICEF memulai pembentukan sistem pemantauan perlindungan anak darurat pada akhir 2014. Sistem ini diharapkan untuk memantau dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran paling parah mengenai hak anak-anak, seperti penyusunan tentara anak, eksploitasi seksual, dan juga perpindahan dari keluarga dan penculikan ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

Ada beberapa proses dalam pemantauan:

- a. Kasus partisipasi anak-anak dalam pasukan bersenjata dikumpulkan dan didokumentasikan;
- b. Kasus merekrut anak-anak ke dalam pasukan bersenjata, yang terlibat atribut kejahatan perang, didokumentasikan;
- c. Rekomendasi disiapkan untuk lembaga nasional dan internasional untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam pasukan bersenjata yang terjadi dalam konflik bersenjata di timur Ukraina.

Hasil dari pemantauan menunjukkan bahwa anak-anak yang direkrut ke dalam pasukan bersenjata di wilayah Donetsk dan wilayah Luhansk yang tidak dikontrol

oleh pemerintah Ukraina, telah berpartisipasi dalam konflik bersenjata baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak direkrut untuk melayani dengan senjata di pos-pos pemeriksaan, sebagai pejuang atau penjaga, dll. Ada banyak kasus partisipasi tidak langsung dengan memata-matai, membawa pesan, bertindak sebagai sekretaris serta dukungan kembali (misalnya, bekerja di dapur). Dari 37 kasus yang terdokumentasi, di mana jumlah terbesar informasi diketahui, 21 anak berpartisipasi langsung dalam konflik yang membawa senjata, dalam 5 kasus adalah partisipasi tidak langsung yang terdiri dari dukungan balik, dalam 4 kasus adalah partisipasi tidak langsung yang terdiri dari mata-mata, lewat pada pesan, administrasi toko senjata dll, dan dalam satu kasus partisipasi langsung dan tidak langsung digabungkan (dukungan kembali).

### ***Advokasi dan Kemitraan untuk Hak Anak***

UNICEF mengimplementasikan program yang disebut Advokasi, Informasi, dan Kebijakan Sosial dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil serta media untuk membantu mengembangkan kebijakan dan norma yang ramah anak, membangun sistem pemantauan yang transparan dan efisien untuk hak-hak anak dan memberdayakan kaum muda untuk mengenal dan menikmati hak-hak mereka ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

Sejak terjadinya konflik pada tahun 2014 di Ukraina, ketika pihak UNICEF telah memantau dan menemukan bukti bahwa terjadi perekrutan anak-anak menjadi pasukan bersenjata di wilayah konflik Ukraina, UNICEF dengan segera mengimplementasikan program advokasi, informasi dan kebijakan sosialnya untuk anak-anak di Ukraina.

Dengan dukungan UNICEF tersebut, empat pemerintah lokal di Ukraina bagian barat telah membentuk Dewan Penasehat Anak untuk memberi nasehat kepada pemerintah lokal tentang isu-isu mengenai anak-anak dan remaja. Dari bantuan UNICEF, enam kota bekerja untuk memperkenalkan model tata kelola Kota Ramah Anak. UNICEF mempromosikan pelaporan media yang etis melalui adopsi dan berbagi dengan jurnalis Ukraina “Buku Pedoman Hak Asasi Media dan Anak-Anak” dan 50 organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan hak-hak anak. UNICEF secara teratur melakukan kampanye informasi di kalangan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hak-hak anak-anak, terutama anak-anak dan keluarga yang paling rentan, di Ukraina ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan berikut telah dilaksanakan:

- a. Pengembangan sistem pemantauan dan advokasi hak-hak anak yang komprehensif.
- b. Pengenalan model tata kelola Kota Ramah Anak untuk mendorong redistribusi sumber daya untuk memberi manfaat bagi anak-anak dan keluarga dengan anak-anak; meningkatkan kualitas layanan sosial; melindungi anak-anak yang rentan; dan memperkenalkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.
- c. Memperkuat kapasitas pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang diinformasikan melalui sistem manajemen data untuk menyusun, menyimpan dan memetakan data.

- d. Membantu Pemerintah Ukraina untuk mengembangkan dan menerapkan Rencana Aksi Aksi Nasional untuk Anak-anak dan dokumen kebijakan penting lainnya.
- e. Memastikan partisipasi anak-anak dalam proses pengambilan keputusan dengan memberi mereka suara melalui dewan penasihat media dan anak.
- f. Melibatkan media massa dalam kemitraan untuk anak-anak.

UNICEF di Ukraina juga bekerja untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari eksploitasi, selain itu UNICEF juga memberikan bantuan teknis untuk memperbaiki sistem peradilan anak dan melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak dan standar internasional lainnya. Membantu menguraikan dan mengimplementasikan pengembangan layanan sosial yang dihasilkan dari dukungan layanan sosial untuk memberikan bantuan psikologis. Membantu pemerintah dalam meninjau ulang undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pelebagaan anak-anak. UNICEF telah mendukung pengembangan rancangan undang-undang tentang masa percobaan, termasuk masa percobaan bagi remaja yang berkonflik dengan hukum. Rekomendasi-rekomendasi metodologis untuk mempersiapkan para pelaku remaja untuk pembebasan mereka dari penahanan telah dikembangkan ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

UNICEF memperkirakan bahwa setidaknya 1 dari 4 anak - sekitar 200.000 anak perempuan dan anak lelaki - di dua wilayah yang paling terkena dampak konflik di timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk oblasts, membutuhkan dukungan psikososial yang mendesak dan berkelanjutan. UNICEF telah memberikan dukungan psikososial kepada lebih dari 46.000 anak dan melatih hampir 5.000 guru dan psikolog ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

Mariupol adalah salah satu kota yang telah menyaksikan banyak kekerasan. Terletak di timur Ukraina di Laut Azov, Mariupol berjarak sekitar 25 kilometer dari garis kontak senjata, yang membagi wilayah yang dikontrol pemerintah dan non-pemerintah di mana pertempuran paling intens. Di kota tersebut terdapat 4 klub remaja yang didukung UNICEF yang dikelola oleh Serikat Pemuda Mariupol. Keempat klub remaja yang didukung UNICEF di kota Mariupol menarik sekitar 1.000 pengunjung muda setiap bulan dan menyediakan hingga 150 sesi konseling psikologis individual untuk anak-anak dan remaja. Semua layanan di klub remaja tidak dikenai biaya ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

#### ***Upaya Perlindungan Anak***

Rekrutmen dan penggunaan seorang anak dalam formasi bersenjata melibatkan tanggung jawab pidana bagi perekrut. Tindakan perekrut dapat dianggap, antara lain, sebagai eksploitasi pekerja anak. Tiga kategori dapat diidentifikasi di antara formasi bersenjata yang melakukan perekrutan: pasukan pemerintah (tentara reguler), formasi bersenjata tidak teratur (kelompok yang didukung oleh pemerintah); kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah. Perlu dicatat bahwa untuk kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah, larangan perekrutan lebih tinggi daripada di dua kategori pertama. Sesuai dengan Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tidak dapat direkrut dalam angkatan bersenjata atau kelompok dan tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam permusuhan (Pasal 4 dari Protokol). Pasal 4 Protokol Opsional untuk Konvensi PBB tentang Hak Anak

menetapkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata negara tidak boleh merekrut atau menggunakan dalam permusuhan orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Di antara kasus-kasus yang didokumentasikan ada setidaknya lima yang memiliki atribut kejahatan perang karena perekrut merekrut seorang anak di bawah usia 15 tahun, perekrut tahu bahwa anak itu berusia di bawah 15 tahun, aksi terjadi dalam konteks konflik bersenjata, dan perekrut menyadari keadaan aktual yang membuktikan adanya konflik bersenjata.

Berdasarkan Hukum Internasional dalam hukum hak asasi manusia menyatakan 18 tahun merupakan usia minimum untuk perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam permusuhan. Merekrut dan menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara dilarang di bawah hukum humaniter internasional - perjanjian dan adat - dan didefinisikan sebagai kejahatan perang oleh *International Criminal Court*. Pihak-pihak yang berkonflik yang merekrut dan menggunakan anak-anak didaftar oleh Sekretaris Jenderal dalam annexes laporan tahunannya tentang anak-anak dan konflik bersenjata. Namun di Ukraina sendiri, sejak terjadinya krisis politik pada tahun 2014 yang mengakibatkan terjadinya perekrutan tentara anak oleh pihak pemerintah dan pemberontak, hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada para perekrut.

Dalam laporan baru, UNICEF mengatakan semua pihak secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional yang dirancang untuk melindungi yang paling rentan terkena dampak konflik yakni anak-anak. Di bagian timur Ukraina, 220.000 anak-anak hidup di bawah ancaman konstan dari ranjau darat dan perangkat lain yang tidak meledak yang tersisa dari perang. UNICEF meminta semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk segera mengakhiri pelanggaran terhadap anak-anak dan menargetkan infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit. UNICEF juga menyerukan kepada negara-negara yang memiliki pengaruh atas pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan pengaruh itu untuk melindungi anak-anak ([www.radionz.co.nz](http://www.radionz.co.nz)).

*The United Nations Children's Agency* mengatakan konflik di Ukraina telah sangat mempengaruhi kehidupan setengah juta anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak dikendalikan oleh pemerintah Kyiv dan dekat garis depan pertempuran dengan separatis pro-Rusia. Dalam sebuah pernyataan pada Februari 2016, UNICEF mengatakan satu dari tiga anak-anak itu, berjumlah sekitar 580.000, sekarang membutuhkan dukungan psikologis setelah dua tahun kekerasan di timur Ukraina ([www.voanews.com](http://www.voanews.com)).

Perwakilan UNICEF di Ukraina, Giovanna Barberis, mengatakan ada kebutuhan besar untuk menjangkau anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka. UNICEF mengatakan lebih dari 215.000 anak-anak mengungsi dari daerah konflik, dan lebih dari 20 anak tewas dalam kekerasan pada tahun 2015. UNICEF menyerukan pada kedua pihak dalam konflik Ukraina untuk memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan kepada anak-anak yang membutuhkan. Badan itu mengatakan telah bekerja untuk menyediakan anak-anak di daerah yang terkena

dampak dengan dukungan psikososial, pendidikan, pasokan kebersihan, vaksin dan informasi tentang ranjau darat dan bahaya masa perang lainnya ([www.dw.com](http://www.dw.com)).

Sejak 2015, UNICEF dan mitra-mitranya telah menangani masalah ini dengan menyediakan program Pendidikan Risiko Ranjau, di mana mereka mengajar anak-anak kecil cara melindungi diri dari ranjau, persenjataan perang yang tidak meledak, dan sisa-sisa perang yang meledak-ledak lainnya. UNICEF juga telah memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi lebih dari seperempat juta anak-anak yang terkena dampak konflik lanjutan di Ukraina ([www.dw.com](http://www.dw.com)).

Dalam menangani perekrutan tentara anak di Ukraina, pihak UNICEF tentunya memiliki tantangan dan juga hambatan untuk memainkan perannya di wilayah tersebut. Salah satu tantangannya adalah pihak UNICEF sulit untuk mengidentifikasi perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh pihak pemberontak. Pada umumnya anak-anak yang menjadi pasukan dari pihak pemberontak adalah mereka yang secara langsung menyaksikan peperangan yang terjadi dan melihat keluarganya menjadi korban sehingga mereka ikut terlibat dalam pertempuran.

Selain itu, sulit untuk menggambarkan secara penuh skala keterlibatan anak-anak dalam pasukan bersenjata, karena di sana tidak ada statistik pemerintah tentang hal ini. Pada saat yang sama, bukti yang dikumpulkan selama pemantauan memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa fenomena ini cukup meluas. Ini berlaku khususnya untuk bagian Donetsk dan wilayah Luhansk tidak dikontrol oleh pemerintah Ukraina.

Di wilayah Donetsk dan wilayah Luhansk yang tidak dikendalikan oleh pemerintah, anak-anak Ukraina masih direkrut dan terus berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pasukan bersenjata. Di wilayah yang dikendalikan oleh negara, anak-anak berpartisipasi dalam pasukan bersenjata sukarela pada tahap awal konflik bersenjata.

Hasil dari peranan UNICEF di Ukraina pada laporan terakhir 31 Oktober 2017, UNICEF memiliki cadangan dana bantuan US \$ 14,7 juta dari US \$ 31.200.000 (47 persen didanai). Sekitar 160.000 orang yang tinggal di pemukiman yang paling dekat dengan garis depan, termasuk 30.000 anak-anak, mendapat manfaat dari kupon uang tunai dan pendidikan. Lebih dari 82.000 anak-anak, remaja dan pengasuh yang tinggal dalam jarak 15 km dari garis depan menerima dukungan psikososial melalui sekolah-sekolah, tim-tim mobil dan penjangkauan berbasis masyarakat ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

Pendidikan risiko ranjau menyelamatkan jiwa mencapai lebih dari 700.000 anak dan keluarga mereka. Lebih dari 138.000 anak laki-laki dan perempuan diuntungkan dari rehabilitasi 87 sekolah dan taman kanak-kanak dan penyediaan materi pendidikan ke fasilitas sekolah yang paling rentan dalam jarak 5 km dari garis depan. Selain itu, lebih dari 3.800 orang tua dan guru menerima pelatihan tentang kecakapan hidup dan pendidikan dalam keadaan darurat ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

UNICEF akan terus memperkuat ketahanan anak-anak, memberikan dukungan yang menyelamatkan hidup dan membangun kapasitas jangka panjang masyarakat dan lembaga di daerah-daerah yang terkena dampak konflik di Ukraina. UNICEF tetap berkomitmen untuk memastikan akses ke gender spesifik dan pendidikan usia-sensitif, serta ruang belajar yang aman dengan program *WASH (water, sanitation and hygiene)*, layanan perlindungan berbasis masyarakat dan dukungan psikososial langsung untuk anak-anak dan perempuan yang paling rentan. Layanan perawatan kesehatan utama di lini depan akan didukung melalui tim seluler mitra, keterlibatan masyarakat, dan sistem kupon tunai ([www.unicef.org](http://www.unicef.org)).

### **Kesimpulan**

Krisis politik yang terjadi di Ukraina sejak tahun 2014 mengakibatkan konflik antara pemerintah dan pihak oposisi. Dari konflik tersebut menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran termasuk salah satunya adanya isu perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai pasukan bersenjata / tentara. UNICEF yang merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB tentunya memiliki peranan dalam mencegah dan menghentikan perekrutan tentara anak tersebut.

Beberapa usaha telah dilaksanakan oleh pihak UNICEF diantaranya: Melakukan pemantauan untuk memastikan kebenaran tentang isu perekrutan tentara anak; Advokasi dan perlindungan bagi anak-anak; Serta melakukan investigasi dan berusaha untuk memberikan sanksi kepada para pelaku perekrutan tentara anak. Dari hasil peranan yang telah dilakukan, yakni berdasarkan pantauan pihak UNICEF telah menemukan bukti tentang adanya perekrutan tentara anak dan pihak UNICEF telah mencegah agar tidak semakin banyak anak-anak yang direkrut. UNICEF di Ukraina juga mengimplementasikan program advokasi, informasi dan kebijakan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memberdayakan anak-anak dalam mengenal dan menikmati hak-hak mereka.

Peranan UNICEF di Ukraina belum bisa dikatakan berhasil karena konflik di wilayah tersebut masih terus terjadi dan isu tentang tentara anak belum bisa dihentikan secara menyeluruh akibat sulitnya untuk menjangkau anak-anak yang terlibat pada pasukan pemberontak. Selain itu, dalam kasus perekrutan tentara anak ini belum ada pihak-pihak yang mendapatkan sanksi secara hukum.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Alan.B. Mountjoy. 1984, *Dunia Ketiga dan Tinjauan Permasalahannya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Beah, Ishmael, 2007. *A Long Way Gone: Memoar Seorang Tentara Anak-anak*, Mizan Media Utama: Jakarta
- Collier Paul, 2005, *The Market For Civil War* dalam Robert G. Arts dan Roberts Jervis, *International Politics : Enduring Concepts Ana ContemporaryIssues*. 7<sup>th</sup>Edition, Longman : New York

Marsha L. Hackenberg. 2000, *Can the Optional Protocol For the Convention on the Rights of the Child Protect the Ugandan Child Soldier?* 10 Ind. Int'l & Comp. L. Rev.

**Internet**

*Child Protection Programme*, dalam [https://www.unicef.org/ukraine/activities\\_11386.html](https://www.unicef.org/ukraine/activities_11386.html), diakses tanggal 20 Maret 2018

*Child recruitment by armed forces or armed groups*, dalam [https://www.unicef.org/protection/57929\\_58007.html](https://www.unicef.org/protection/57929_58007.html), diakses tanggal 15 April 2018

*Children in War-Torn Ukraine learn the art of war*, dalam <https://apimagesblog.com/blog/2017/8/4/children-in-war-torn-ukraine-learn-the-art-of-war>, diakses tanggal 24 Agustus 2017

*Child Soldiers Global Report 2004 - Ukraina*, dalam <http://www.refworld.org/docid/4988061f28.html>, diakses 05 Mei 2017

*Defining Humanitarian Aid*, dalam <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid>, diakses pada 23 Mei 2017

*Healing emotional wounds from conflict in eastern Ukraine*, dalam [https://www.unicef.org/ukraine/children\\_30740.html](https://www.unicef.org/ukraine/children_30740.html), diakses tanggal 20 Maret 2018

*How Prevalent are Far Right Nationalist in Ukraine*, dalam <https://medium.com/@mattflorence/how-prevalent-are-far-right-nationalists-in-ukraine-c04b9fb5b3d9>, diakses tanggal 24 Agustus 2017

*Justice For Peace in Donbas Coalition*, 2016. "EASTERN-UKRAINIAN CENTRE FOR CIVIC INITIATIVES - INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED FORMATIONS DURING THE MILITARY CONFLICT IN DONBAS", dalam <http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/03/Children-in-armed-formations.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2018

*Pemberontak Ukraina dituding Rekrut Tentara remaja dibawah Umur*, dalam <http://www.suara.com/news/2015/01/04/021500/pemberontak-ukraina-dituding-rekrut-tentara-remaja-di-bawah-umur> diakses tanggal 11 Mei 2017

*Tentara anak*, dalam <https://www.scribd.com/doc/96986489/Tentara-anak> diakses pada 6 Desember 2016

*Two years on, Ukraine conflict affects over half a million children - UNICEF*, dalam [https://www.unicef.org/media/media\\_90268.html](https://www.unicef.org/media/media_90268.html), diakses tanggal 20 Maret 2018

*Ukraine Country Overview*, dalam, <http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002>, diakses tanggal 25 Januari 2018

*Ukraine crisis: Renewed Kiev assault on protesters*, dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26252679>, diakses tanggal 25 Januari 2018

*Ukraine's New President: Is the Orange Revolution Over?*,

dalam <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1963613,00.html>, diakses tanggal 25 Januari 2018

*Ukraine rebels train child soldiers in the making*, dalam <http://www.businessinsider.com/afp-ukraine-rebels-train-child-soldiers-in-the-making-2015-6/?IR=T> diakses tanggal 01 Agustus 2017

*UNICEF has no proof of child soldiers in Ukraine*, dalam <https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/unicef-osce-have-no-proofs-about-child-soldiers-in-ukraine-379014.html>, diakses tanggal 01 Agustus 2017